



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 37/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT1.1/II/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, perlu dibentuk Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai sebagai Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

KEDUA : Tugas Tim adalah sebagai berikut :


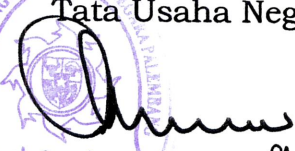
- a. Melakukan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2024;
- b. Menuangkan evaluasi tersebut kedalam Lembar Kerja Evaluasi dan memenuhi evidennya dan di upload ke dalam Aplikasi SEMAR;
- c. Melakukan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- d. Membuat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 untuk Pengadilan Tata Usaha Negara se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan melaporkan Laporan Hasil Evaluasi tersebut ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

KETIGA...*J*

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 16 Februari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,

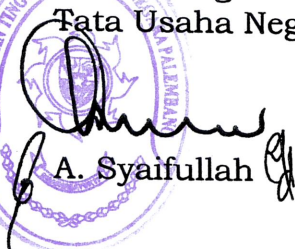


A. Syaifullah

Lampiran I Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 37/KPPTUN.W5-TUN/SK.OT1.1/II/2024
Tanggal : 16 Februari 2024

**TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

No.	Nama	Jabatan	
		Kedinasan	SK
1.	A. SYAIFULLAH, S.H.	Ketua	Pengarah
2.	KAMER TOGATOROP, S.H.M.AP.	Wakil Ketua	Pembina
3.	IRNA, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Pengawas
4.	RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.	Panitera	Anggota Tim
5.	H. AGUSTAM EFFENDI, S.H., M.H.	Sekretaris	Anggota Tim
6.	ALKODAR, S.H., M.H.	Panmud Perkara	Anggota Tim
7.	INDRA MUFTI, S.H.	Panmud Hukum	Anggota Tim
8.	RESSY MIRLIANA SARI, S.H., M.H.	Kabag Umum Keuangan	Anggota Tim
9.	YURISTA SUKMAH, S.Sos.	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota Tim
10.	MUHAMMAD ABDULLAH, A. Md., S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Anggota Tim
11.	NOVALIA SIMANJUNTAK, S.H.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota Tim
12.	DEBBY CORAZONA PRATIWI, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota Tim
13.	NORA AGUSTINA, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota Tim
14.	HARY YULIANSYAH, A.Md.	Pranata Komputer Pelaksana	Anggota Tim
15.	APRILIA BERLIANDA, A.Md.A.B.	Arsiparis Terampil	Anggota Tim

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,

A. Syaifullah